

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada system phisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000 dalam Kodoatie,R.J.,2005). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan Nasional. Infrastruktur juga merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur secara memadai akan mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat dan dunia

usaha secara lebih mudah dan murah. Jika investasi dapat dilakukan dengan murah karena tersedianya infrastruktur pendukung, maka investasi akan meningkat sehingga akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik (Marlia, 2009).

Terdapat & kelompok besar besar jenis infrastruktur (Grigg dan Fortune, 2000) sebagai berikut;

1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan),
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan)
3. Komunikasi
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa, dll)
5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat)
6. Bangunan
7. Distribusi dan produksi energi

2.2 Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul Halim). Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu;

1. Investasi pada *financial assets*, dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

2. Investasi pada *real assets*, diwujudkan dalam bentuk pembelian *assets* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain faktor Sumber Daya Alam, faktor Sumber Daya Manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan. (Cahya, 2013)

Investasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kondisi ekonomi negara Indonesia yang masih tergolong rendah, investasi-investasi demi pembangunan sangat dibutuhkan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi langsung yang diarahkan pada sektor produktif atau investasi pada *social-overhead* seperti pada pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya.

Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Besarnya investasi harus disertai dengan kemampuan sumber daya manusia pada daerah tersebut dalam memaksimalkan potensi dan peluang investasi yang ada agar dapat

mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi.

2.3 Nusa Tenggara Timur

Propinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang secara astronomis terletak antara $8^{\circ} - 12^{\circ}$ Lintang Selatan dan $118^{\circ} - 125^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara Samudra Indonesia dan Laut Flores yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah seperti:

1. Sebelah Utara dengan Laut Flores
2. Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia
3. Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste
4. Sebelah Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Luas wilayah daratan Provinsi NTT sekitar 4.734.990 ha tersebar pada 1.192 pulau yang terdiri dari 43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni, terdiri dari 20 Kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh pulau besar, yaitu Pulau Sumba, Timor, Flores, Alor, Lembata, Rote, dan Sabu (NTT dalam angka-BAPPEDA NTT, 2014).

Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Luas Daerah <i>Total Area</i> (hektar)	Banyaknya <i>Number of</i>	
		Kecamatan <i>District</i>	Kelurahan/Desa <i>Sub-district/Village</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sumba Barat	73 742	6	74
02. Sumba Timur	700 050	22	156
03. Kupang	543 772	24	177
04. Timor Tengah Selatan	394 700	32	278
05. Timor Tengah Utara	266 966	24	175
06. Belu	244 557	12	81
07. Alor	286 460	17	175
08. Lembata	126 638	9	151
09. Flores Timur	181 285	19	250
10. Sikka	173 192	21	160
11. Ende	204 662	21	278
12. Ngada	162 092	12	151
13. Manggarai	169 435	11	162
14. Rote Ndao	128 000	10	89
15. Manggarai Barat	294 750	10	169
16. Sumba Tengah	186 918	5	65
17. Sumba Barat Daya	144 532	11	131
18. Nagekeo	141 696	7	113
19. Manggarai Timur	249 455	9	176
20. Sabu Raijua	46 054	6	63
21. Malaka ¹⁾	...	12	127
71. Kota Kupang	16 034	6	51
Jumlah/Total	4 734 990	306	3 252

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT, 2014

2.4 Kondisi Fisik Wilayah

Sebagian besar wilayah NTT bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 – 118 kilometer. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni - September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering (NTT dalam angka-BAPPEDA NTT, 2014).

2.5 Kondisi Perekonomian

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, terutama potensi ekonomi untuk diberdayakan sesuai dengan kemampuan daerah dan prospek di masa mendatang.

Struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur tahun 2013 didominasi sektor pertanian, jasa-jasa, dan perdagangan.

Tabel 2.2 Struktur Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	35,15	34,18
2.	Pertambangan	1,34	1,34
3.	Industri Pengolahan	1,46	1,38
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,45	0,46
5.	Konstruksi	7,15	6,34
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	18,33	18,19
7.	Angkutan, Telekomunikasi	5,68	7,52
8.	Keuangan	4,37	4,10
9.	Jasa-jasa	26,07	26,50
		100,00	100,00

Sumber : BPS NTT, 2013

Jika dilihat perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (dapat dilihat pada Tabel 1.1), menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai 5.348 miliar rupiah di Kota Kupang dan PDRB terendah sebesar 334 miliar rupiah terdapat di Kabupaten Sumba Tengah. (BPS-NTT Tahun 2011).

2.6 Infrastruktur di Nusa Tenggara Timur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang mendorong produktifitas suatu daerah. Berkembangnya ekonomi suatu daerah dapat didukung dengan adanya sarana transportasi yang memadai. Transportasi darat yang terdiri dari jalan, jembatan dan angkutan sungai, danau dan

penyebrangan (ASDP) dan keselamatan lalu lintas merupakan prasarana angkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan- kegiatan perekonomian. Untuk transportasi darat, secara keseluruhan pada tahun 2013 provinsi NTT dilayani jaringan jalan sepanjang 19.915,68 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 1.406,68 km, jalan Provinsi sepanjang 1.737,31 km, dan jalan Kabupaten/kota sepanjang 16.771,69 km. Untuk panjang jalan berdasarkan jenis permukaan jalan, berdasarkan data yang diperoleh jalan Nasional yang diaspal mencapai 1.4406,86 km dan jalan Provinsi yang diaspal mencapai 1.675,34 km dan yang tidak diaspal 61,97 km. (Sumber ; Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur). Ketersediaan jaringan jalan di NTT untuk mendukung transportasi darat cukup memadai.

Karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbentuk kepulauan membuat transportasi laut memiliki peranan yang sangat penting dan cukup potensial untuk dikembangkan. Provinsi NTT terdapat lebih dari 43 pulau yang terpencil memerlukan sarana dan prasarana angkutan / perhubungan laut yang memadai. Pelabuhan baik lokal, regional dan nasional cukup tersebar di setiap kabupaten di NTT, namun perlu peningkatan kualitas prasarana pendukung khususnya pelabuhan lokal yang merupakan jumlah terbesar dari pelabuhan yang telah ada. Keadaan Provinsi NTT yang terdiri dari pulau-pulau tidak saja membutuhkan angkutan laut tetapi juga perlu ditunjang oleh kegiatan angkutan udara. Hampir semua kabupaten/kota di Provinsi NTT telah memiliki pelabuhan udara. (Dinas Perhubungan NTT Dalam Angka, 2007).

2.7 Investasi di Nusa Tenggara Timur

Perkembangan realisasi nilai investasi PMA dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) meningkat, realisasi nilai investasi PMA tahun 2012 tercatat sebesar 8.72 juta US\$ meningkat lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah proyek sebanyak 20 proyek. Sementara realisasi investasi PMDN meningkat, realisasi PMDN tahun 2012 tercatat sebesar 14,39 milyar rupiah lebih besar dibandingkan realisasi PMDN tahun sebelumnya dengan jumlah proyek sebanyak 3 proyek.

Tabel 2.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi NTT Tahun 2010-2012

Tahun	PMA		PMDN	
	Juta US\$	Proyek	Rp. Miliar	Proyek
2010	3.83	12	0.08	4
2011	5.49	24	1.00	3
2012	8.72	20	14.39	3

Sumk

Investasi pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (Perkembangan Pembangunan Provinsi NTT, 2014).